

P PULIKA

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Jaminan Persalinan Dalam Upaya Meningkatkan Perilaku Sehat Ibu Hamil Resiko Tinggi Pada Keluarga Miskin di Kota Palembang

Safira Soraida

Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Istri/Suami dan Tanggungan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Pendidikan IPA Pada Mahasiswa Program Penyetaraan D-II Kelompok Belajar Kecamatan Karangmojo Gunungkidul

Hardiman

Penerapan Model Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta

Suwarjo dan Jumadi

Instanisasi Peran Struktur Dalam Pemilihan Presiden 2014

Djaja Hendra

Memaknai Kembali Budaya Patriarki dan Ketidakadilan Gender

Dwi Astuti dan As Martadani Noor

Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* di Kab. Sleman

Joko Nugraha

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengolahan Bambu Di Kec. Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta

Paharizal dan Retno Kusumawiranti

Presiden Republik Indonesia dan Gaya Kepemimpinannya

Syakdiah

POPULIKA

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Pelindung:

Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Penasehat:

Dekan FISIP Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Pemimpin Umum:

Dra.Syakdiah, M.Si

Pimpinan Redaksi:

Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi:

Dwi Astuti, S.Sos., M.Si

Staff Redaksi:

Paharizal, S.Sos, MA

Dewan Penyunting:

Dr. Djaja Hendra, M.Si

Dra.Hj.Nurul Ropikoh, M.Si

Diterbitkan Oleh:

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Widya Mataram
Yogyakarta

Sebagai Forum Komunikasi Terbatas

ISSN : 0216-2490

Alamat Redaksi :

Dalem Mangkubumen KT.III/237 Yogyakarta 55132

Telp. (0274) 7112403

e-mail : populika.fisip.uwmy@gmail.com

Jurnal POPULIKA diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Terbit setahun sekali, jurnal ini sebagai media informasi dan forum pembahasan problema sosial dan politik mutakhir di tanah air. Berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian, pendampingan, atau gagasan orsinil yang segar, kritis, dan transformatif. Redaksi mengajak para ahli, praktisi, aktivis dan masyarakat luas untuk berpartisipasi mengirimkan karyanya.

Naskah ditulis sesuai format penulisan ilmiah yang berlaku.

DAFTAR ISI

Safira Soraida	4 - 16	Program Jaminan Persalinan dalam Upaya Meningkatkan Perilaku Sehat Ibu Hamil Resiko Tinggi Pada Keluarga Miskin di Kota Palembang
Hardiman	17 - 26	Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Istri/Suami dan Tanggungan Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Pendidikan IPA pada Mahasiswa Program Penyetaraan D-II Kelompok Belajar Kecamatan Karangmojo Gunungkidul
Suwarjo dan Jumadi	27 - 47	Penerapan Model Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta
Djaja Hendra	48 - 56	Instanisasi Peran Struktur Dalam Pemilihan Presiden 2014
Dwi Astuti dan As Martadani Noor	57 - 74	Memaknai Kembali Budaya Patriarki dan Ketidakadilan Gender (Studi Terhadap Pergeseran Ketidakadilan Gender Sebagai Praktek Budaya Patriarki dalam Perubahan Peran Publik Perempuan)
Joko Tri Nugraha	75 - 90	Mewujudkan <i>Good Governance</i> Melalui Pelayanan Publik Berbasis <i>E-Government</i> di Kabupaten Sleman
Paharizal dan Retno Kusumawiranti	91 - 100	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengolahan Bambu di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman Yogyakarta
Syakdiah	101 - 119	Presiden Republik Indonesia dan Gaya Kepemimpinannya

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PENGO- LAHAN BAMBU DI KECAMATAN MINGGIR, KABU- PATEN SLEMAN YOGYAKARTA

Oleh: Paharizal

farizalpoli@yahoo.com

Dosen Program Studi Sosiologi

Universitas Widya Mataram Yogyakarta.

Retno Kusumawiranti

Retno_Zans@yahoo.com

Dosen Program Studi Administrasi Negara

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Abstract

The biggest problem that until now have not been able to overcome the problem of the availability of Indonesia is decent jobs for society. So many villagers who became gray to access employment in urban. Despite the fact, they become porters or bum. Though many natural resources in rural areas can be developed, one of the natural potential that can be developed and have high economic value is a bamboo tree, which is considered a weed by farmers.

In the development of the natural potential of bamboo, the local community should cooperate with other actors concerned with the empowerment of rural communities. The parties involved in the empowerment of bamboo processing, namely the government, the public, community leaders, trader, NGO's and other actors. establishment of the interaction and interrelationship of the actors is what makes bamboo processing can run well and automatically will be as an alternative to job creation.

Key words: bamboo, empowerment, interrelation, village

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia, berdasarkan data BPS tahun 2010, penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa, dapat dipastikan bahwa jumlah tersebut terus meningkat. Peningkatan jumlah penduduk ini akan menjadi masalah yang sangat

besar, terutama dalam hal penyediaan lahan untuk pemukiman, ataupun hanya untuk sekedar memanfaatkan sejenkal tanah untuk menanam sayur-sayuran (Soetrisno, 1995). Jumlah penduduk yang terus meningkat juga akan berpengaruh terhadap aksesibilitas dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan,

sehingga banyak warga yang memilih menjadi urban diwilayah perkotaan, walaupun akhirnya terpaksa menjadi kuli atau gelandangan. Persoalan ini menjadi isu utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah, agar masyarakat desa tidak lagi pindah kekota dengan alasan mengadu nasib. Untuk itulah pemerintah terus mendorong terjadinya pemerataan pembangunan. Upaya tersebut menjadi terobosan untuk melibatkan masyarakat dalam konsepsi pembangunan yang memberdayakan masyarakat desa agar dapat pemanfaatan lahan dan kekayaan alam yang ada disekitar masyarakatnya. Salah satu potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan urbanisasi, lapangan pekerjaan, pemerataan pembangunan dan perekonomian masyarakat adalah dengan memanfaatkan pohon bambu. Semula pohon ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat Indonesia hanyalah sebagai gulma yang mengganggu pertanian masyarakat. Namun masyarakat China, Jepang, Vietnam telah lama memanfaatkan pohon bambu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat petani. Pada tahun 1998, produksi pohon bambu dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 18.900 orang di Anji, China (López dan Shanley, 2005). Padahal, pada masa itu banyak warga negara Indonesia yang kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi menghantam Indonesia.

Walaupun pohon bambu belum menjadi basis penguatan ekonomi masyarakat, namun pemanfaat pohon bambu sudah lama terjadi dalam masyarakat desa di Indonesia. Mereka

menggunakan bambu sebagai bahan bangunan seperti reng, gedhek (sasak) dan wadah makanan. Saat ini masyarakat Indonesia terus mengembangkan inovasi teknologi untuk menjadikan bambu sebagai bahan baku alternatif pengganti benang berkualitas tinggi (<http://jogjanews.com/jelang-kongres-bambu-nasional-2013-terbentuk-komunitas-masyarakat-bambu-indonesia-yogyakarta>)

Di Yogyakarta, salah satu wilayah yang mengoptimalkan sumberdaya alam bambu adalah wilayah Minggir Sleman Yogyakarta. Masyarakat diwilayah ini bekerja sebagai pembuat kerajinan bambu yang memiliki nilai seni dan nilai ekonomi tinggi. Kondisi inipula yang melatarbelakangi satu desa di kecamatan Minggir dijadikan desa wisata kerajinan bambu dan pendidikan pengelolaan potensi alam (<http://www.bambubrajan.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B07:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B07:00&max-results=11>).

TUJUAN DAN METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan aktor-aktor dan bentuk relasi sosial yang terbangun dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis pengolahan bambu, serta untuk mengetahui model pemberdayaan yang terbangun didalam masyarakat Minggir, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini akan menghasilkan gambaran utuh mengenai *mapping* tentang keterlibatan para aktor dalam men-

jalin relasi sosial dan interaksi. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk pengembangan/pengayaan bahan ajar perkuliahan Sosiologi Lingkungan, Sosiologi Ekonomi Indonesia, Teori Globalisasi dan Pembangunan, juga Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian ini merupakan sebuah studi, yang menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field work*) yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan *opened interview* (Hareen dalam Soeratmo dan Arsyad, 2003) dan dilakukan melalui teknik *snowball sampling* (Mulyana, 2007). Pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi, *indept interview*, serta pengumpulan dokumen-dokumen dan foto-foto yang memperkuat hasil penelitian, agar hasil penelitian lebih akurat. Sedangkan dalam proses analisis data dilakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan pedoman analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).

PARTISIPASI ANTAR-AKTOR DALAM PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan secara aktif dari aktor dalam proses kegiatan masyarakat hingga pada tahapan aplikasi, implementasi, serta implikasinya. Dusseldorp (*dalam* Mardikantoro, 2011) menyebutkan bahwa munculnya partisipasi bisa berasal dari motivasi intrinsik yang lahir diri sang aktor yang secara sadar mau terlibat dalam segala aspek pembangunan. Namun partisipasi tersebut

juga bisa muncul akibat terinduksi oleh motivasi ekstrinsik dari aktor lain yang membujuk, mempengaruhi ataupun mendorong agar adanya partisipasi. Dusseldorp juga menambahkan bahwa tekanan dari nilai-nilai atau norma yang berlaku, serta tekanan sosial ekonomi yang membuat sang aktor merasa takut kehilangan status sosial atau tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Sementara itu Raharjo (*dalam* Mardikantoro, 2011) mengemukakan ada tiga variasi bentuk partisipasi. Pertama, partisipasi terbatas yaitu suatu bentuk partisipasi yang digerakkan hanya untuk pencapaian tujuan tertentu. Kedua partisipasi penuh (*full scale participation*) yakni, suatu partisipasi yang dilakukan oleh sang aktor dalam segala aspek kegiatan secara totalitas. Ketiga, mobilisasi tanpa partisipasi yaitu suatu bentuk partisipasi yang didorong oleh aktor penguasa (pemerintah) dengan mengabaikan pertimbangan dan tuntutan dari masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam, Visvanathan dan Gawe (2006) menekankan agar stakeholder mendorong untuk melakukan pendekatan baru dengan melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Visvanathan dan Gawe juga menyampaikan bahwa, seharusnya telah menjadi prioritas pemerintah lokal dengan melakukan pelibatan masyarakat, dan aktor lainnya dalam mode ekonomi berbasis pada kreativitas komunitas dalam bentuk pengolahan lingkungan. Pengolahan sumberdaya lingkungan ini, akan dapat meminimalisir terjadinya kerusakan dan pencemaran

terhadap lingkungan serta merupakan bentuk pengakuan terhadap peran dan penguatan kelembagaan lokal di masyarakat.

Terkait dengan beberapa faktor munculnya partisipasi tersebut diatas, dalam penelitian Mani Ram Moktan dkk (2009) menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengolahan hutan bambu di Bjoka, Zhemgang, Bhutan disebabkan ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap sumberdaya alam, khususnya bambu sebagai ekonomi subsisten di rumah tangga masyarakat pedesaan. Untuk itulah masyarakat desa yang tinggal dilingkungan dengan kelimpahan sumberdaya alam berupa bambu selalu berpartisipasi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga menjaga sumberdaya agar tetap dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup mereka.

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menurut Ife dan Tesoriero (2008) pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan suatu masyarakat yang dirugikan (*the disadvantaged*) guna mewujudkan pembangunan yang merata bagi kesejahteraan bersama. Terkait dengan ini, Sulistiyani (2004) menyebutkan bahwa pembangunan yang memberdayakan masyarakat merupakan pembangunan yang mempunyai nilai-nilai kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerin-

tah. Untuk itu, pendekatan atau model dalam pemberdayaan masyarakat yang sesuai adalah; a) Model perencanaan pembangunan ekonomis diinisiasi yang oleh masyarakat, karena gagasan ini dari masyarakat, maka pembangunan tersebut dipastikan sesuai dengan *local wisdom* yang berlaku; b). Implementasi pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh masyarakat mendapatkan tanggapan dari pemerintah; d). pembangunan dapat dimanfaatkan dan sekaligus di-manajemen berdasarkan sistem sosial masyarakat dimana mereka tinggal. Model pemberdayaan tersebut diatas, tidak menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan tetapi mitra dari pemerintah dan bahkan memposisikan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator yang membantu dalam memberikan informasi, konsultasi, anggaran, tenaga ahli yang dibutuhkan, teknologi, dll.

Sementara itu Suharto (2010) ada 3 model pemberdayaan, yaitu a) Aras mikro, atau lebih dikenal dengan pendekatan berpusat pada tugas (*task centered approach*) pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu dengan memberikan pelatihan dan bimbingan terhadap klien dalam menjalankan tugas-tugasnya, b) Aras meso, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Kelompok-kelompok tersebut dijadikan media intervensi dan strategi dalam meningkatkan pengetahuan serta keahlian. Kelompok-kelompok tersebut, kemudian diberikan ketrampilan, melalui pendidikan, pelatihan, c) Aras makro, atau lebih populer dengan strategi

sistem besar (*large-system strategy*), pemberdayaan model ini dilakukan dengan menyoar lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dalam model pemberdayaan ini, klien dipandang sebagai mitra yang memiliki kompetensi yang memadai serta memahami persoalan sehingga dapat dilibatkan dalam perumusan pembuatan strategi aksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan dan Relasi Sosial Antaraktor

Pada tahun 1990, permintaan akan barang-barang yang berasal dari bambu semakin besar dan semakin beragam. Hal ini disebabkan kerajinan bambu mulai didesign dengan sangat menarik oleh warga masyarakat yang kreatif untuk menciptakan barang baru. Adanya permintaan terhadap kerajinan bambu itu, membuat para pengrajin yang kreatif membutuhkan tenaga tambahan. Lalu warga masyarakat yang kreatif itu, mengajari warga masyarakat yang lainnya dengan tujuan mendapatkan memenuhi permintaan pasar dan mendapatkan keuntungan yang besar. Walaupun tujuan utama dari salah seorang warga masyarakat untuk mengajari, warga masyarakat lainnya membuat kerajinan bambu yang inovatif didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi hal inilah yang kemudian membuat hampir semua masyarakat di desa Sendang Agung dan desa Sendang Mulyo mempunyai ketrampilan untuk membuat berbagai macam kerajinan bambu. Jadi perencanaan pembangunan ekonomi yang ada desa Sendang Agung dan desa Sendang Mulyo dapat dikatakan merupakan diinisiasi

riil yang dilakukan oleh masyarakat, untuk mengembangkan dan membangun ekonomi. Lalu potensi kreativitas masyarakat mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Tanggapan dari pemerintah itu, merupakan suatu model pemberdayaan yang tidak menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan tetapi mitra dari pemerintah dan bahkan memposisikan pemerintah hanyalah sebagai fasilitator Sulistiyani (2004). Keterlibatan pemerintah dalam pengolahan bambu terlihat dari pelatihan mendesign dan pewarnaan pada tahun 1986, oleh dinas perindustrian. Dari pelatihan itu, kemudian dibentuk kelompok pengrajin bambu yang diberi nama "Ngudi Makmur". Kelompok pengrajin bambu tersebut berjumlah 20 orang. Kehadiran pemerintah dalam pengolahan kerajinan bambu di Kecamatan Minggir, membuat hasil produksi masyarakat semakin menarik, sehingga penampilan kerajinan itu terlihat lebih menarik dan akhirnya laku dipasaran. Dan mulai saat itu pula kerajinan bambu mulai banyak digandrungi dipasarkan, fakta ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan keberdayaan didalam masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang merata bagi kesejahteraan bersama (Ife dan Tesoriero, 2008). Namun sayangnya kelompok pengrajin yang telah dibentuk itu, harus bubar karena setiap anggota memiliki kepentingan-kepentingan pribadi untuk mengembangkan usahanya masing-masing.

Selain pernah adanya keterlibatan dinas perindustrian dalam mewujudkan pembangunan yang merata bagi kesejahteraan bersama dalam kon-

teks pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pengolahan bambu. Hasil penelitian sementara juga, menemukan bahwa adanya keterlibatan perangkat desa, pengelola desa wisata, tengkulak, distributor atau toko-toko yang menjual kerajinan bambu dalam mendorong berjalannya proses produksi kerajinan bambu di Kecamatan Minggir, Sleman. Secara intrinsik, partisipasi masyarakat pengrajin bambu dalam mengembangkan ekonominya yang berbasis pada pengolahan bambu, terbangun karena kesadarnya tentang pengolahan bambu mempunyai nilai ekonomi yang baik bagi mereka. Sedangkan secara ekstrinsik, pengembangan ekonomi kreatif dari bahan dasar bambu diakibatkan adanya partisipasi dari pemerintah, adanya keterlibatan perangkat desa, pengelola desa wisata, tengkulak, distributor atau toko-toko yang menjual kerajinan bambu yang ikut mempengaruhi ataupun mendorong agar masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut (Dusseldorp dalam Mardikantoro, 2011)

Berdasarkan relasi sosial, ada beberapa aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat berbasis pengolahan kerajinan dengan bahan dasar bambu, namun keterlibatan para aktor tersebut tidak sekaligus tetapi sifatnya periodik ;

a. Periode tahun 1980-2006

Pada periode ini aktor-aktor yang terlibat adalah a) Masyarakat lokal, secara keseluruhan masyarakat lokal merupakan pengrajin, yang memproduksi suatu

komoditi (barang dagangan). Pada dasarnya, masyarakat lokal diuntungkan dengan adanya anggota masyarakat yang menjadi inisioator modifikasi design dan inovasi motif kerajinan dari bambu. Karena inisiatif merekalah, beberapa desa di Kecamatan Minggir menjadi terkenal dengan kerajinan bambunya, b). Inisiator yang merupakan anggota masyarakat yang karena jasanya dalam mendorong proses pemberdayaan mereka dianggap sebagai tokoh masyarakat, bahkan diantaranya ada yang menjadi mentor, untuk memberikan pelatihan-pelatihan pengolahan bambu di beberapa wilayah luar pulau Jawa, c) Pengusaha lokal atau tengkulak, yang berperan mengatur jalannya pasar, d) Pemerintah, yang bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi sejahtera dan menjamin agar masyarakat dapat mandiri dengan mengolah bambu sebagai kerajinan tangan.

b. Periode Tahun 2006-2011

Pada periode tahun 2006-2011 aktor yang terlibat dalam percepatan peningkatan ekonomi masyarakat, sub-player (tengkulak nasional) dan NGOs. Mereka memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memproduksi berbagai macam kerajinan bambu. Para sub-player itu juga terlibat aktif dalam mencari pangsa pasar, walaupun keterlibatan para sub-player tersebut mempunyai tendensi ekonomi yang sangat tinggi. artinya keterlibatan mereka

hanya sebatas pada ruang bisnis, karena kalau menguntungkan mereka maka akan terbuka ruang pasar bagi masyarakat pengrajin, tetapi jika tidak ada keuntungan maka masyarakatpun tidak dapat menjual atau mendistribusikan hasil produksinya. Sementara NGOs, lebih memainkan peran-peran sosial politik, secara terbuka mereka bertindak seakan-akan tanpa pamrih, tetapi secara laten keesistensi-an mereka akan mendapatkan pengakuan dari para founding, sehingga mereka mendapatkan *benefit cost* yang sangat besar.

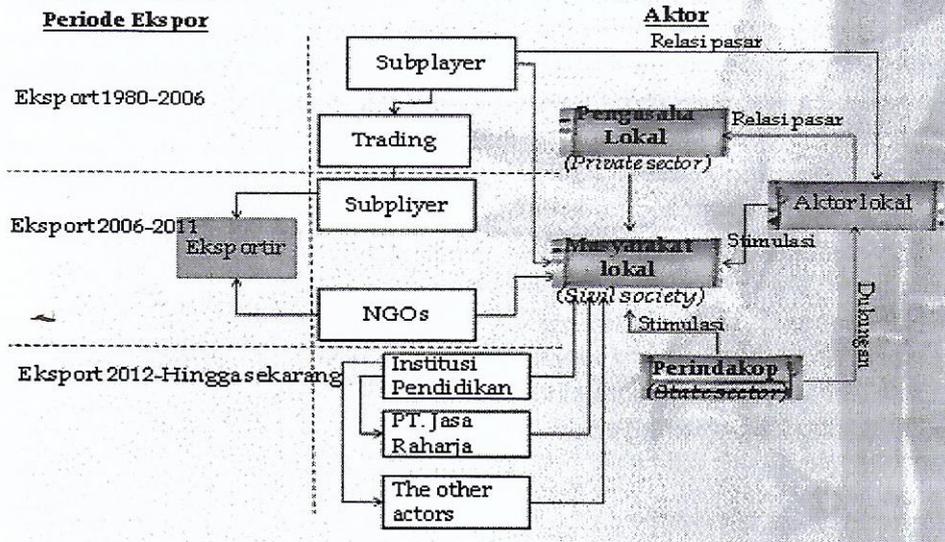
c. Periode Tahun 2012- Sekarang

Periode ini merupakan periode yang sangat seru, karena banyak

sekali aktor-aktor yang terlibat mulai dari institusi, jasaraharja, aktor-aktor lainnya (*the other actors*) seperti trading, supliyer, kelompok organisasi lainnya. Kehadiran para aktor tersebut membuat dinamika pemberdayaan masyarakat semakin baik. Karena banyak pilihan bagi masyarakat untuk akses sesuatu yang akan mereka inginkan. Hingga kini, masyarakat sangat terbuka dengan keterlibatan para aktor, terutama jika yang datang atau yang terlibat adalah pihak trading yang dapat membeli dan mendistribusikan hasil produksi.

Secara keseluruhan hubungan ditataran para aktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut ;

Relasi aktor



Jadi berdasarkan gambar tersebut ada 3 periode yang memperlihatkan fase-fase keterlibatan para aktor. Dimana aktor lokal dan pemerintah

yang direpresentasikan oleh Perindagkop memberikan stimulasi kepada masyarakat untuk serius dalam melakukan pengolahan bambu. Se-

mentara pengusaha lokal mempunyai relasi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat pengrajin, namun relasi tersebut dalam kerangka bisnis. Sementara tahun 2006 merupakan awal keterlibatan para aktor, kemudian pada tahun 2012, banyak aktor yang terlibat baik sebagai aktor pemberdaya untuk memberikan pelatihan maupun sebagai aktor bisnis yang mempunyai akses pemberdayaan.

2. Model Pemberdayaan yang Terbangun di Dalam Masyarakat

Memakai istilah yang digunakan oleh Dusseldorp (*dalam* Mardikantoro, 2011), tentang partisipasi yang menjadi penyebab kemunculan pemberdayaan ditengah-tengah masyarakat Minggir Sleman Yogyakarta yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Istilah itu penting dipakai karena kedua istilah inilah dinilai oleh peneliti yang paling cocok untuk menggambarkan model pemberdayaan masyarakat berbasis pengolahan bambu, yaitu:

1. Intrinsik

Munculnya motivasi masyarakat dalam membangun perekonomian yang berdampak pada meningkatnya keberdayaan masyarakat, disebabkan adanya faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Prinsip pemberdayaan sebagaimana disampaikan oleh Sulistiyani mengenai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sangat sesuai dengan model pemberdayaan yang terjadi pada dinamika masyarakat Kecamatan Minggir dalam pengolahan bambu menjadi barang-barang

kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomi dan nilai seni yang tinggi.

Anggota masyarakat yang menginisiasi proses modernisasi pada design kerajinan bambu mengambil posisi hanya sebagai distributor / agen atau dalam bahasa masyarakat lokal disebut dengan tengkulak. Para tengkulak ini, bertugas untuk membuka akses pemasaran melalui trading, suplaiyer, LSM (*the other actors*) baik yang ada di Yogyakarta, Solo maupun Semarang.

Dengan terbukanya pasaran untuk menjual barang-barang kerajinan bambu, maka masyarakatpun semakin termotivasi untuk mengembangkan produk mereka. Sehingga, banyak warga yang beralih profesi menjadi pengrajin pengolah bambu.

2. Ekstrinsik

Partisipasi dalam pemberdayaan yang disebabkan efek ekstrinsik terjadi akibat adanya keterlibatan aktor luar dalam proses penguatan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Para aktor ini masuk kedalam sistem sosial ekonomi masyarakat ketika potensi pemberdayaan sudah mulai terbangun, namun konsep-konsep pemberdayaan yang terjadi masih sangat lemah.

Kehadiran para aktor yang terlibat dalam proses pemberdayaan masyarakat ini, sangat membantu dalam mengintruduksi serta

memitivasi agar masyarakat yang belum terlibat secara aktif karena persoalan kesadaran, permodalan, dan keahlian dapat disorong untuk terlibat dalam sistem pengolahan bambu yang sudah berjalan didalam dinamika masyarakat minggir akibat eksese dari anggota masyarakat yang sudah memulai cikal bakal pemberdayaan tersebut.

Namun dengan masuknya para aktor yang datang dari luar itu, tujuan pemberdayaan mulai terorganisir dengan baik. Para aktor ini, membukakan ruang-ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pelatihan manajemen, organisasi, design, permodalan, pemasaran, dan aksesibilitas lainnya.

KESIMPULAN

Peningkatan jumlah penduduk juga menjadi salah satu faktor yang membuat Kota Yogyakarta menjadi tambah sesak, macet, dan banyak polusi. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengatasi problematika tersebut, yaitu dengan melakukan pembangunan desa yang terintegrasi dengan kepentingan dasar masyarakat desa. Salah satu persyaratan pembangunan yang bersifat terintegrasi dengan kepentingan masyarakat desa itu, yaitu harus adanya partisipasi masyarakat yang merupakan bentuk keterlibatan secara aktif dari aktor dalam proses kegiatan masyarakat hingga pada tahapan aplikasi, implementasi, serta implikasinya. Munculnya partisipasi bisa berasal masyarakat itu sendiri ataupun adanya dorongan dari luar.

Untuk itu diperlukan sebuah kesadaran didalam masyarakat terutama dalam upaya melakukan pemberdayaan sumberdaya alam secara kolektif yang dibarengi dengan keinginan untuk meningkatkan standar ekonomi yang berdimensi pada kearifan local (*localwisdom*). Sebab pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan suatu masyarakat untuk itu diharapkan masyarakat dapat melakukan inisiasi pengembangan ekonominya.

Salah satu persyaratan pembangunan yang bersifat terintegrasi dengan kepentingan masyarakat desa itu, yaitu harus adanya partisipasi masyarakat yang merupakan bentuk keterlibatan secara aktif dari aktor dalam proses kegiatan masyarakat hingga pada tahapan aplikasi, implementasi, serta implikasinya.

Munculnya partisipasi bisa berasal masyarakat itu sendiri ataupun adanya dorongan dari luar. Untuk itu diperlukan sebuah kesadaran didalam masyarakat terutama dalam upaya melakukan pemberdayaan sumberdaya alam secara kolektif yang dibarengi dengan keinginan untuk meningkatkan standar ekonomi yang berdimensi pada kearifan local (*localwisdom*). Sebab pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan suatu masyarakat untuk itu diharapkan masyarakat dapat melakukan inisiasi pengembangan ekonominya.

Dalam memanfaatkan sumberdaya alam tersebut, masyarakat didorong oleh berbagai macam aktor diantaranya adalah masyarakat sendiri sebagai aktor utama, kemudian aktor

yang muncul dari dalam masyarakat yang menginisiasi terjadinya proses pemberdayaan, kemudian muncul aktor-aktor lainnya seperti sub-player, NGOs, Perusahaan asuransi, pemerintah, trader dan perguruan tinggi.

Dalam partisipasi dan fokus pemberdayaan, terlihat bahwa ada nuansa intrinsik dimana ada kesadaran dan keinginan dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberdayaan. Tetapi ada juga unsur ekstrinsik dimana adanya dorongan, rayuan dan penyadaran dari pihak luar sang aktor yang mempengaruhi pilihan-pilihan masyarakat untuk terlibat dalam proses pemberdayaan.

Dalam konsepsi pemberdayaan sifat pemberdayaannya masih dalam skala mikro dan meso, karena yang disasar adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat. Para aktor yang tergabung dalam proses pemberdayaan hanya baru dapat memberdayakan masyarakat dalam skala tersebut.

SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan sebagai sebuah saran yang konstruktif untuk dilakukan, diantaranya;

1. Perlu adanya wadah atau lembaga yang dapat menampung produksi kerajinan bambu sebagai produk ekonomi kreatif. Lembaga tersebut harus dibawah pengawasan pemerintah.

2. Negara atau pemerintah perlu membuka akses pemasaran bagi produksi kerajinan bambu, baik dalam skala nasional maupun internasional.
3. Perlu memutus mata rantai yang diperankan oleh tengkulak-tengkulak, yang dapat memper-mainkan harga produksi, sehingga masyarakat pengrajin yang dirugikan.
4. Perlu menambah kawasan yang akan dijadikan penanaman bambu, sehingga dapat terjamin produksi bambu dalam skala besar.
5. Agar pemerintah mendorong serta mengintegrasikan dinas-dinas yang bersangkutan sehingga masyarakat mendapatkan perhatian dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia "*Pola Pembiayaan Usaha Kecil (PPUK) Industri Kerajinan Mebel Bambu; Pola Pembiayaan Syariah*". Diakses pada 13 Desember 2013 melalui; <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/6AEEA76C-71C9-4239-8FB2-9CF69A057CCB/15921/Industri-KerajinanMebelBambuSyariah.pdf>
- Brajan. 3 Oktober 2013. "*Kunjungan Study Banding dari KUDUS*". Diakses pada 15 Desember 2013 melalui: <http://www.bambubrajan.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00%2B07:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00%2B07:00&max-results=11>